



KEBIJAKAN **PUBLIK**

*Teori, Proses,
dan Praktik Strategis*

Abdul Nashar | St Jawiah

KEBIJAKAN PUBLIK

TEORI, PROSES, DAN PRAKTIK STRATEGIS

Penulis:

Abdul Nashar | St Jawiah



PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku
buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing
proses penerbitan buku.

KEBIJAKAN PUBLIK

Teori, Proses, dan Praktik Strategis

*Copyright @2025 By Abdul Nashar, dkk
All right reserved*

Penulis

Abdul Nashar dan St Jawiah

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofita HM

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M. Sc.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-355-6

Cetakan ke-1, Mei 2025

14 x 21 cm, x + 182 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000, 00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000, 00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000, 00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

SEGALA puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini yang berjudul *“Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Praktik Strategis.”* Buku ini memadukan landasan teoritis, dinamika proses kelembagaan, serta refleksi empiris dari praktik kebijakan yang lahir dan tumbuh dari realitas sosial. Dihadirkan sebagai bagian dari ikhtiar ilmiah dalam mengembangkan khazanah keilmuan kebijakan publik di Indonesia.

Buku ini tidak dimaksudkan sebagai jawaban final atas seluruh persoalan kebijakan publik. Sebaliknya, ia merupakan undangan terbuka bagi para pembaca untuk berdialog, menelaah, dan terus mengembangkan praktik kebijakan yang lebih baik, kontekstual, dan relevan dengan tantangan zaman. Untuk membantu pembaca memahami struktur dan arah buku ini, penulis menyertakan peta jalan buku yang menggambarkan pengembangan isi secara sistematis dari bab ke bab.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat

diharapkan demi penyempurnaan pada edisi-edisi selanjutnya.

*Wabillāhit-taufiq wal-hidāyah, wassalāmualaikum
warahmatullāhi wabarakātuh.*

Kendari, Medio April 2025

Penulis

PETA JALAN BUKU

DIHARAPKAN peta jalan ini menjadi panduan awal bagi pembaca dalam menelusuri alur pembahasan, memahami keterkaitan antarbagian, serta menangkap pesan utama dari setiap bab yang disajikan

Bab pertama menyajikan konsep dasar mengenai kebijakan publik, menjelaskan pengertian, tujuan, dan karakteristik utama yang menjadi pondasi awal dalam memahami dinamika kebijakan. Melalui landasan teoritik seperti teori sistem, elite, pluralisme, dan institusionalisme, pembaca dibekali kerangka berpikir untuk memahami bagaimana kebijakan dirancang dan dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan. Selain itu, pembahasan mengenai aktor negara dan non-negara serta lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya menjadi penentu arah dan isi dari kebijakan publik.

Bab kedua menguraikan berbagai pendekatan dalam analisis kebijakan, dimulai dari pendekatan normatif dan empiris yang memisahkan antara aspek ideal dan realitas kebijakan. Dilanjutkan dengan pendekatan rasional dan inkremental yang memberikan perspektif teknokratik dan bertahap terhadap pengambilan keputusan. Pendekatan kritis dan reflektif kemudian memperluas cakrawala analisis dengan menyoroti isu-isu struktural, ketimpangan

sosial, dan dominasi kekuasaan dalam perumusan kebijakan. Integrasi pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih tajam, kritis, dan kontekstual.

Bab ketiga mengulas siklus kebijakan publik mulai dari formulasi hingga evaluasi. Agenda setting menjadi gerbang awal penentuan prioritas isu publik. Proses formulasi membutuhkan sinergi antar-aktor dengan kepentingan yang beragam, sementara implementasi menjadi tahap yang penuh tantangan karena berkaitan langsung dengan kapabilitas birokrasi dan realitas sosial. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas kebijakan, serta memberikan masukan terhadap kebijakan baru. Pada bab ini juga dijelaskan pentingnya integrasi antara proses, aktor, dan konteks kebijakan, serta tantangan dinamis yang sering muncul dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Bab keempat mengajak pembaca belajar dari praktik lapangan melalui studi kasus pelayanan publik di Indonesia. Kasus pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD memperlihatkan kompleksitas penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. Administrasi kependudukan melalui Dukcapil menjadi contoh transformasi pelayanan menuju sistem digital yang lebih cepat dan akuntabel. Bantuan sosial menjadi refleksi atas pentingnya ketepatan sasaran dan keadilan distribusi dalam intervensi pemerintah. Setiap studi kasus memberikan pelajaran kebijakan yang penting sebagai dasar perbaikan layanan.

Bab kelima menyajikan strategi peningkatan mutu pelayanan publik. Pendekatan berbasis data menjadi kunci dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif. Penguatan sumber daya manusia aparatur menjadi keharusan agar pelayanan publik dijalankan secara

profesional, efisien, dan berintegritas. Inovasi teknologi dan digitalisasi membuka ruang untuk pelayanan yang lebih cepat, inklusif, dan transparan. Di sisi lain, sistem pengawasan dan evaluasi dibutuhkan agar proses pelayanan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan peningkatan berkelanjutan.

Bab keenam membahas pentingnya inovasi dan transformasi dalam kebijakan publik. Di tengah era disrupsi dan ketidakpastian global, inovasi menjadi alat penting untuk menjawab berbagai tantangan baru. Pendekatan co-creation menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam proses kebijakan, memperkuat legitimasi dan efektivitas implementasi. Smart governance menjadi simbol integrasi antara teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial.

Bab ketujuh mengupas metodologi dan tools dalam analisis kebijakan publik. Penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif membuka ruang untuk kajian mendalam maupun pengukuran berbasis angka terhadap kebijakan. Tools digital seperti simulasi kebijakan, big data analytics, dan sistem informasi geografis membantu pengambil kebijakan dalam menavigasi kompleksitas persoalan. Selain itu, teknik pemetaan stakeholder dan analisis jaringan aktor memungkinkan penyusunan strategi yang lebih realistis dan efektif.

Bab kedelapan menyoroti kapasitas kelembagaan dan profesionalisme analis kebijakan. Institusi yang kuat dan adaptif menjadi fondasi keberhasilan kebijakan publik. Analis kebijakan dituntut memiliki kompetensi teknis, integritas etika, dan kecakapan digital untuk menjawab kebutuhan zaman. Penguatan kapasitas SDM dan

institusionalisasi peran analisis kebijakan di pemerintahan akan menciptakan ekosistem kebijakan yang lebih solid dan berkelanjutan.

Bab kesembilan menyajikan desain strategis untuk masa depan pelayanan publik yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Visi transformatif, pilar kebijakan inklusif dan evidence-based, serta reformasi birokrasi digital menjadi prioritas utama. Inovasi layanan harus diarusutamakan dari sekadar eksperimen menuju praktik sistemik. Integrasi lintas strategi dan sektor menjadi keharusan untuk menciptakan pelayanan publik masa depan yang tangguh dan responsif.

Bab kesepuluh sebagai penutup merangkum seluruh pelajaran dari teori, proses, hingga praktik kebijakan yang telah dibahas. Tantangan-tantangan masa depan seperti perubahan iklim, ketimpangan digital, dan tekanan global menuntut pendekatan kebijakan yang agile dan kolaboratif. Pemerintahan cerdas dan berkeadilan adalah cita-cita bersama yang harus dibangun dengan kebijakan publik yang reflektif, partisipatif, dan transformatif. Buku ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu kebijakan publik dan praktik pemerintahan yang lebih baik di Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PETA JALAN BUKU	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 KONSEP DAN DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK	1
1.1. Pengertian, Tujuan, dan Karakteristik Kebijakan Publik	1
1.2. Teori-Teori Kebijakan Publik.....	7
1.3. Aktor dan Lingkungan Kebijakan Publik	13
BAB 2 TEORI DAN PENDEKATAN DALAM ANALISIS KEBIJAKAN.....	19
2.1. Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Analisis Kebijakan Publik.....	19
2.2. Pendekatan Rasional dan Inkremental dalam Analisis Kebijakan Publik.....	23
2.3. Pendekatan Kritis dan Reflektif dalam Analisis Kebijakan	29
BAB 3 PROSES KEBIJAKAN: DARI FORMULASI HINGGA EVALUASI.....	35
3.1. Tahapan dalam Proses Kebijakan Publik	35
3.2. Aktor dan Peran dalam Setiap Tahap Kebijakan	39

3.3. Integrasi Proses, Aktor, dan Konteks dalam Analisis.....	42
3.4. Dinamika dan Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Publik.....	45
BAB 4 BELAJAR DARI LAPANGAN: STUDI KASUS DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA	51
4.1. Studi Kasus Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah).....	51
4.2. Studi Kasus Administrasi Kependudukan (Dukcapil)	56
4.3. Studi Kasus Bantuan Sosial dan Ketepatan Sasaran Layanan	60
4.4. Pelajaran Kebijakan dari Praktik Lapangan.....	64
BAB 5 STRATEGI PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA	69
5.1. Pendekatan Berbasis Data dalam Peningkatan Kualitas Layanan	69
5.2. Strategi Penguatan SDM Aparatur Pelayanan Publik.....	73
5.3. Inovasi Teknologi dan Digitalisasi Layanan Publik.....	79
BAB 6 INOVASI DAN TRANSFORMASI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK.....	85
6.1. Inovasi Kebijakan di Era Disrupsi	85
6.2. Co-Creation dan Kebijakan Partisipatif	91
6.3. Smart Governance dan Kebijakan Berbasis Teknologi	99

DAFTAR REFERENSI

- Anderson, J. E. (2014) *Public Policymaking*. Boston: Cengage Learning.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008) Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Ansell, Chris, & Torfing, Jacob. (2016) *Handbook on Theories of Governance*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- BPS. (2023) *Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Birkland, T. A. (2016) *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. New York: Routledge.
- Boardman, Anthony E., Greenberg, David H., Vining, Aidan R., & Weimer, David L. (2018) *Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bovaird, T., & Loeffler, E. (2016) *Public Management and Governance (3rd ed.)*. London: Routledge.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014) *Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management*. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456.

- Christensen, T., & Lægreid, P. (2011) *The Ashgate Research Companion to New Public Management*. Burlington, VT: Ashgate.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003) *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Armonk, NY: M. E. Sharpe.
- Dryzek, John S. (2013) *The Politics of the Earth: Environmental Discourses*. Oxford: Oxford University Press.
- Drèze, Jean & Stern, Nicholas. (2016) *Evaluation of Public Policy: Normative and Empirical Considerations*. Oxford: Oxford University Press.
- Dunn, W. N. (2018) *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.
- Dunn, William N. (2017) *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.
- Dwiyanto, A. (2006) *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eppel, Elizabeth, & Karacaoglu, Girol. (2022) *Complexity and Public Policy: A Systems Approach*. Singapore: Springer.
- Fischer, Frank. (2003) *Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices*. Oxford: Oxford University Press.
- Forester, John. (1999) *The Deliberative Practitioner: Encouraging Participatory Planning Processes*. Cambridge: MIT Press.
- Foucault, Michel. (1991) *Governmentality*. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality* (pp. 87–104). Chicago: University of Chicago Press.

- Frederickson, H. G. (1990) *Public Administration and Social Equity*. *Public Administration Review*, 50(2), 228–237.
- Gramsci, Antonio. (1971) *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- Habermas, Jürgen. (1984) *The Theory of Communicative Action, Volume One: Reason and the Rationalization of Society*. Boston: Beacon Press.
- Head, Brian. (2023) *Digital Era Governance: Innovation in Public Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Heeks, R. (2006) *Implementing and Managing e Government: An International Text*. London: SAGE Publications.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014) *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance*. London: Sage Publications.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009) *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford: Oxford University Press.
- Howlett, Michael & Ramesh, M. (2020) *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford: Oxford University Press.
- Husereau, Don, et al. (2022) *Guidelines for Economic Evaluation of Health Technologies*. Berlin: Springer Nature.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021) *Panduan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik*. Jakarta: KemenPAN-RB.
- LAN RI. (2020) *Model Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

- Lindblom, Charles E. (1959) *The Science of 'Muddling Through'*. Public Administration Review, 19(2), 79–88.
- Lindblom, Charles E. (1979) *Still Muddling, Not Yet Through*. Public Administration Review, 39(6), 517–526.
- Marttunen, Mika, et al. (2017) *Multi-Criteria Decision Analysis in Integrated Water Resource Management*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Mintzberg, H. (1996) *Managing Government, Governing Management*. Harvard Business Review, 74(3), 75–83.
- Nugroho, R. (2018) *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- OECD. (2017) *Core Skills for Public Sector Innovation*. Paris: OECD Publishing.
- Ombudsman RI. (2022) *Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia*. Jakarta: Ombudsman RI.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992) *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Reading, MA: Addison- Wesley.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988) *SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality*. Journal of Retailing, 64(1), 12–40.
- Parkhurst, Justin. (2017) *The Politics of Evidence: From Evidence-Based Policy to the Good Governance of Evidence*. London: Routledge.

- Parsons, Wayne. (1995) *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Patton, M. Q. (2008) *Utilization-Focused Evaluation*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Peters, B. G. (2020) *Advanced Introduction to Public Policy*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Rein, Martin & Schön, Donald A. (1993) *Reframing Policy Discourse*. In F. Fischer & J. Forester (Eds.), *The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning* (pp. 145–166). Durham: Duke University Press.
- Rhodes, R. A. W. (1997) *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Buckingham: Open University Press.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (Eds.) (2014). *Theories of the Policy Process*. Boulder, CO: Westview Press.
- Stone, Deborah. (2012) *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making*. New York: W. W. Norton & Company.
- Torring, J., Peters, B. G., Pierre, J., & Sørensen, E. (2012) *Interactive Governance: Advancing the Paradigm*. Oxford: Oxford University Press.
- Torring, Jacob et al. (2012) *Interactive Governance: Advancing the Paradigm*. Oxford: Oxford University Press.
- United Nations. (2022) *E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government*. New York: UNDESA.
- Wahyudi, D. (2020) *Teknokrasi dan Analisis Kebijakan di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Weimer, David L., & Vining, Aidan R. (2017) *Policy Analysis: Concepts and Practice*. New York: Routledge.

- Wholey, J. S., Hatry, H. P., & Newcomer, K. E. (2010) *Handbook of Practical Program Evaluation* (3rd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- World Bank. (2018) *Data-Driven Decision-Making in the Public Sector*. Washington, DC: The World Bank.
- Yanow, Dvora. (2000) *Conducting Interpretive Policy Analysis*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

TENTANG PENULIS

| Abdul Nashar

Beliau adalah Doktor dalam bidang Ilmu Manajemen dengan konsentrasi Administrasi Publik. Ia merupakan dosen tetap pada Program Studi Magister Pemerintahan, Pascasarjana, Universitas Sulawesi Tenggara. Selain aktif dalam kegiatan pengajaran dan penelitian di bidang kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta pelayanan publik, beliau juga telah dipercaya menjabat sebagai Ketua Divisi Sumber Daya Manusia selama lebih dari empat tahun di salah satu perusahaan lokal. Di luar dunia akademik dan korporasi, beliau juga telah mengemban amanah sebagai Tim Pakar/Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara selama lebih dari 15 tahun. Pengalaman akademik, praktis, dan profesional yang dimilikinya menjadikan buku ini sebagai jembatan yang menghubungkan antara teori dan implementasi kebijakan di lapangan. Kehadiran buku ini merupakan bagian dari kontribusi beliau dalam memperkaya khazanah literatur kebijakan publik yang kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman

St Jawiah

St Jawiah merupakan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Tenggara, dengan spesialisasi pada bidang administrasi publik, manajemen pemerintahan daerah, serta pemberdayaan masyarakat. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, juga Ketua Pusat Studi Gender Universitas Sulawesi Tenggara. Keterlibatannya dalam riset gender, kebijakan sosial, dan advokasi pemberdayaan menjadikan perspektifnya dalam buku ini sangat relevan dalam mendukung transformasi kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.